

LELANG - Sejumlah kendaraan dinas Pemkab Klungkung yang akan dilelang pada akhir 2015 nanti.

Bali Post/dwa

Belasan Mobdin Dilelang Akhir Tahun

Semarang (Bali Post) -

Mobil dinas (mobdin) yang tidak digunakan sejak dua tahun terakhir rencananya dilelang akhir tahun ini. Meski begitu, kepastian pelaksanaan lelang belasan mobil Pemkab Klungkung ini masih menunggu kedatangan tim appraisal yang akan menafsirkan harga sebelum dilepas untuk diperebutkan masyarakat umum.

Selain mobdin lawas yang telah termakan waktu, ada beberapa kendaraan yang diperkirakan masih memiliki harga cukup tinggi, seperti milik unsur pimpinan DPRD Klungkung. Puluhan kendaraan ini teronggok di garasi sebelah barat Kantor Bappeda Klungkung. Meski telah melakukan penghapusan aset, Bagian Perlengkapan Pemkab Klungkung baru bisa menganggarkan pelelangan tahun ini, mengingat terjadi perbedaan aturan dalam proses pelelangan.

Kasubag Penghapusan Bagian Perlengkapan A.A. Raka Sarjana, Kamis (29/10)

kemarin mengungkapkan, pelelangan secara terbuka harus melalui proses penafsiran harga oleh tim appraisal. Oleh karena itu, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kedatangan tim itu guna mulai melakukan penafsiran. Anggaran pada APBD Perubahan untuk pelaksanaan pelelangan diusulkan Rp 50 juta. Dana ini juga digunakan untuk pembiayaan proses penafsiran harga mobil oleh tim appraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Bali.

Aset kendaraan yang telah dihapus di antaranya mobil dinas milik unsur pimpinan, yakni satu unit Honda Accord dan dua unit Vios. "Ada belasan mobil yang akan dilelang plus sepeda motor yang saat ini masih ditaruh di masing-

masing SKPD," ujar Raka Sarjana.

Terkait lamanya proses pelelangan, menurut dia, hal ini disebabkan perubahan aturan dalam proses, sehingga tidak bisa serta merta melakukan lelang. Meski begitu, kendaraan yang sudah dua tahun diparkir di garasi tersebut dipastikan masih bisa digunakan. "Aki sudah kami lepas, jadi tidak ada masalah kalo didiamkan dalam waktu lama," imbuhnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang dilelang harus dinilai dengan penilai yang memiliki sertifikat. Pelelangan secara terbuka ini akan menggunakan ruangan sesuai dengan jumlah peserta yang ikut. (dwa)

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 10



Belum Bersertifikat ✓

Ratusan Bidang Aset Jalan Kabupaten

Singaraja (Bali Post) -

Tidak hanya berupa tanah milik Pemkab, namun aset di jalan kabupaten dan jalan desa di Buleleng hingga kini belum dilengkapi sertifikat. Dari data di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terdapat 426 bidang jalan kabupaten dan jalan desa di Bali Utara belum bersertifikat. Saat ini aset jalan milik Pemkab hanya tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) di BKAD Buleleng.

Kepala Sub-Bidang (Kasubid) Pengamanan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Made Pasda Gunawan, Kamis (29/10) kemarin, mengatakan seluruh aset jalan kabupaten dan jalan desa yang tercatat dalam KIB sejak beberapa tahun, memang belum dilengkapi sertifikat. BKAD sejauh ini belum melakukan upaya pensertifikatan aset jalan tersebut. Upaya itu masih terganjal sulitnya mencari historis keberadaan

lahan tersebut. Padahal, data tersebut menjadi dokumen penting dalam proses pensertifikatan. Kendala lainnya belum ditemukan adanya regulasi yang mengatur tentang pensertifikatan lahan ruas jalan kabupaten maupun jalan desa. Atas kondisi ini, BKAD akan mengomunikasikan persoalan ini dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hal itu dilakukan untuk menelusuri apakah ada regulasi yang mendasari pensertifikatan aset jalan kabupaten dan jalan desa itu sendiri. "Data historis ini sangat penting. Dari penelusuran sulit kami temukan di lapangan. Aturan pensertifikatan aset jalan ini juga kami belum tahu dan rencananya masalah ini kita koordinasikan ke Dinas PU," katanya.

Pasda Gunawan menambahkan, selain aset jalan, BKAD juga mencatat sekolah dasar (SD) di Buleleng banyak

lahannya belum bersertifikat. Sedangkan SMP dan SMA/SMK sudah banyak yang bersertifikat dan tinggal beberapa sekolah saja yang belum bersertifikat seperti SMP 1 Banjar, SMA 1 Tejakula dan SMK 1 Busungbiu.

Dalam upaya pensertifikatan areal sekolah ini, Pasda mengaku menemukan kendala serius. Apalagi, lahan sekolah dasar sebagian besar milik desa adat dan ada juga milik pribadi. Ketika diajukan untuk disertifikatkan, pihak desa justru menolak pensertifikatan lahan sekolah tersebut. "Kita sudah sering sampaikan kalau disertifikatkan itu nanti lahannya bukan dikuasai pemerintah. Manfaatnya ketika pemerintah akan mengucurkan bantuan ke sekolah tersebut bisa dilakukan, alasannya karena lahannya sudah bersertifikat," tegas Pasda. (kmb38)

Edisi : Jum'at, 30 Oktober 2015

Hal : 11



Dugaan Korupsi Pupuk Kejari Amlapura Tunggu Hasil Resmi BPKP



Bali Post/gik

Ivan Jaka

Amlapura (Bali Post) -

Setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap tersangka, Kejari (Kejaksaan negeri) Amlapura mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2013. Kajari Amlapura Ivan Jaka, Kamis (29/10) kemarin, menegaskan pihaknya tinggal menunggu hasil resmi BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), untuk memastikan angka riil kerugian negara dalam kasus tersebut, sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

Setelah hasil resmi itu ke luar, barulah pihaknya bisa merampungkan berkas penuntutan terhadap dua tersangka. Yakni Komang Subratayasa, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (dulu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan pihak rekanan Hamdani. "Kami siapkan empat JPU (jaksa penuntut umum) dengan dua berkas perkara berbeda," tegasnya. Namun, pihaknya belum bisa menyebut nama-nama JPU itu, karena masih menunggu kepastian hasil resmi dari BPKP. Ia juga tidak menjelaskan lebih jauh, kenapa harus menyiapkan sebanyak empat JPU. Diperkirakan hasil pemeriksaan BPKP itu sudah diserahkan secara resmi bulan depan.

Tersangka Subratayasa dan Hamdani ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 Mei lalu. Pengadaan pupuk ini dinilai telah merugikan negara, karena pengadaannya menyalahi prosedur, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Pemberian hibah ini difasilitasi anggota dewan saat itu. Masyarakat yang ingin mendapatkan pupuk seharusnya mengajukan proposal terlebih dahulu yang difasilitasi anggota dewan.

Anehnya, masyarakat sudah mendapat pupuk terlebih dahulu, sementara proposalnya disesuaikan belakangan. Pengadaan pupuk ini dalam dua kali penganggaran. Melalui APBD Induk sebesar Rp 300 juta dan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta. Pupuk yang sudah dibeli, langsung diberikan kepada delapan kelompok tani di empat kecamatan, di antaranya Kecamatan Manggis, Kubu, Rendang, dan Karangasem. Tiga kelompok menerima pupuk melalui APBD Induk, dan sisanya menerima melalui APBD Perubahan. Sehingga, dari anggaran Rp 800 juta, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 490 juta. Namun, kepastiannya masih menunggu hitungan dari BPKP. (kmb31)

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 13



Kasus GOR Nusa Penida Kejari akan Periksa Saksi dari Kemenpora

Semarang (Bali Post) -

Pengusutan kasus dugaan korupsi GOR Nusa Penida oleh pihak Kejari Klungkung tampaknya masih jalan di tempat. Meskipun sudah melakukan penyidikan selama empat bulan, pihak kejaksaan ternyata belum menetapkan calon tersangka. Kacabjari Nusa Penida Dewa Mahayasa berdalih masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk dari staf Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Rencananya ada dua saksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan kami periksa," kata Dewa Mahayasa, Kamis (29/10) kemarin. Ia tidak mau mengungkapkan identitas staf Kemenpora yang akan diperiksa. Yang jelas kedua

saksi akan diperiksa secepatnya. "Pihak kejaksaan sudah melayangkan surat pemanggilan. Mudah-mudahan dalam minggu ini saksi bisa datang untuk diminta keterangan," imbuhnya.

Dewa Mahayasa menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan

GOR Nusa Penida yang menelan dana Rp 2,265 miliar ini akan jalan terus. Apalagi sudah 20 saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut. Saksi terakhir yang diperiksa dari Kemenpora bernama Muhaimin.

Sementara itu, menurut informasi di kejaksaan, dua saksi dari Kemenpora yang

akan diperiksa adalah Alan Hudri dan Abdul Hakim. Keduanya sempat dipanggil untuk diminta keterangan, namun belum bisa memenuhi pemanggilan dan minta pemeriksaan diundur. Mereka rencananya diperiksa terkait dana dari pusat yang dikucurkan untuk pembangunan GOR Nusa Penida. "Pokoknya kami kerja, kerja, dan kerja. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan tidak berulang tahun," tegasnya.

GOR Nusa Penida dibangun sejak 2009 lalu. Proyek ini didanai dari APBN melalui

Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar, dana APBD Provinsi Bali tahun 2010 senilai Rp 65 juta, dan dana APBD Pemkab Klungkung tahun 2010 sebanyak Rp 500 juta. Total anggaran yang sudah dihabiskan Rp 2,265 miliar, akan tetapi sampai saat ini proyek tersebut baru diselesaikan sekitar 70%.

Kasus ini mulai menjadi pergunjangan pejabat di Pemkab Klungkung. Pasalnya, salah satu dari dua tersangka disebut-sebut seorang pejabat eselon III. (kmb)

Edisi : Jum'at, 30 Oktober 2015

Hal : 10



PAD Terkecil di Bali Penagihan Piutang Digencarkan

Bangli (Bali Post) -

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli masih menempati posisi paling buntut di Bali. Untuk tahun ini, PAD ditargetkan mencapai Rp 88 miliar. Agar ke depannya bisa meningkat, pemungutan piutang pajak dan pemberian bimtek perpajakan terus dilakukan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Bangli Gede Suryawan, Kamis (29/10) kemarin.

Dijelaskan, untuk meningkatkan PAD ini tidak hanya dilakukan dengan peningkatan kualitas kantong-kantong penyumbang PAD. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan. "PAD Bangli masih paling buntut. Tentunya itu perlu disikapi secara serius. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM," ujarnya.

Dijelaskan, upaya peningkatan kualitas SDM ini sudah dilakukan. Kamis kemarin, di Gedung Museum Geopark Batur, yang diikuti PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Pasedahan Agung Kabupaten Bangli. "Bimtek sudah kami lakukan," katanya.

Lanjut dia, target PAD

2015 yang mencapai Rp 88 miliar sudah tercapai sekitar 75%. Melihat waktu yang tersisa tinggal satu setengah bulan lagi, upaya penyelesaian piutang salah satunya PBB yang mencapai Rp 9,2 miliar terus dilakukan. "Kami coba untuk menyelesaikan piutang dengan mengklasifikasikan piutang yang kecil dan besar. Nanti itu akan didekati," terangnya.

Mantan Kepala Inspektorat Bangli ini mengatakan, piutang PBB yang belum berhasil tertagih sebelumnya mencapai Rp 10 miliar. "Kami sudah berhasil menagih kisaran Rp 800 juta," ungkapnya seraya mengatakan penagihan ini juga bekerja sama dengan aparat desa.

Menyikapi PAD yang tergolong kecil, Pj. Bupati Bangli I Dewa Gede Mahendra Putra menegaskan, sumber pendapatan yang potensial harus tetap dipelihara agar dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Seperti PBB, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Objek Wisata dan hasil BLUD. "Beberapa hal ini harus dipelihara agar PAD bisa meningkat," pungkasnya. (kmb45)

Edisi : Jumst, 30 Oktober 2015

Hal : 8



Penjabat Bupati Serahkan Rancangan APBD 2016

Tabanan (Bali Post) -

Penyusunan APBD Tabanan 2016 telah memasuki tahapan baru. Setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016 dirampungkan, Kamis (29/10) kemarin, rancangan Perda APBD 2016 diserahkan oleh Pemkab Tabanan selaku pihak eksekutif kepada DPRD, untuk disahkan melalui mekanisme sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi.

Rancangan perda itu nantinya akan diserahkan ke Gubernur Bali guna menjalani proses evaluasi sesuai tata cara penganggaran yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihak eksekutif juga menyerahkan rancangan perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Bank Pembangunan Daerah Bali dan rancangan perda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali.

Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada menguraikan beberapa poin penting yang tertuang dalam rancangan Perda APBD 2016. Di antaranya pos pendapatan daerah yang direncanakan Rp 1,485 triliun lebih. Mengalami peningkatan Rp 80,060 miliar lebih atau 5,70% dari APBD 2015. Pos pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 251,679 miliar lebih, yang mengalami peningkatan Rp 7,885 miliar lebih atau 3,23% dari APBD 2015. (kmb28)

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 14



Ranperda APBD 2016 Ketok Palu Pekan Depan

Denpasar (Bali Post) -

Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali 2016 direncanakan ketok palu pekan depan. Tepatnya pada 3 November atau sehari setelah DPRD Bali menggelar Rapat Paripurna Internal. Jelang ketok palu, pembahasan Ranperda APBD 2016 juga sudah hampir rampung.

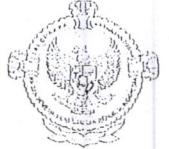
"Saya kira sudah hampir kelar, tinggal kita membuat laporan internal. Kalau rapat internal nanti sudah menerima hasil kerja Pansus, baru diparipurnakan tanggal 3. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa," ujar Ketua Pansus Ranperda APBD 2016, Ketut Kariyasa Adnyana, saat dikonfirmasi Kamis (29/10) kemarin. Kariyasa menambahkan, Pansus telah mengoreksi anggaran kesehatan dan juga anggaran pendidikan yang sebelumnya masih di bawah 20 persen. Anggaran kesehatan disepakati 14 persen dari sebelumnya 11 persen. Sedangkan anggaran pendidikan disepakati hampir 21 persen dari sebelumnya 19,07 persen.

"Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pendidikan kini sudah memenuhi Undang-undang Sisdiknas," jelasnya. Kariyasa mengatakan, pansus juga membahas realisasi dana yang sudah dianggarkan untuk bantuan dan hibah masyarakat. Sebab bila tidak terealisasi, pihaknya khawatir akan menimbulkan Silpa yang cukup tinggi. Sementara penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau lebih banyak Silpa tentu tidak bagus bagi perencanaan, kenapa anggaran itu kok mesti harus dibiarkan," jelasnya. (kmb32)

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 7



Sesi Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa Dibatalkan Panitia UWRF

Gianyar (Bali Post) -

Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang kini menginjak tahun ke-3 terus mendapat tekanan penguasa yang berkongsi dengan pengusaha. Terakhir, sesi diskusi di salah satu program utama *Ubud Writers and Readers Festival (UWRF)* yang mengundang Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) dibatalkan atas tekanan aparat dan pihak lain.

Panitia UWRF sebelumnya mengundang I Wayan "Gendo" Suardana, Jerinx Superman Is Dead, Thor Kerr dari Curtin University untuk berbicara dalam panel tentang gerakan lingkungan yang makin meluas dengan Rudolf Dethu sebagai moderatornya. ForBALI dalam catatan panitia disebut gerakan lingkungan terbesar saat ini.

"When it's environment vs. big business, tempers and passion tend to run high. The planned reclamation of 700ha of water and mangroves for large-scale development has birthed one of the biggest environmental movements in Indonesia's history: Bali Tolak Reklamasi. This session has been cancelled," sebut panitia dalam website UWRF sejak Selasa (27/10) lalu.

Kepada ForBALI, pihak panitia men-

gatakan terpaksa membatalkan karena permintaan banyak pihak seperti aparat keamanan yang mengganggu diskusi ini tak sesuai tujuan festival yakni sebagai event budaya dan pariwisata.

Menanggapi pembatalan sesi ForBALI di UWRF, Wayan "Gendo" Suardana dari ForBALI mengaku tekanan terus terjadi pada masyarakat Bali yang terus bergerak menolak investasi besar di Teluk

Benoa yang akan me-*ngurug* laut 700 hektar ini. Akan tetapi, tekanan seperti ini sudah biasa dialami oleh ForBALI. "Kalau ForBALI sih biasa saja karena hal begini sudah kenyang kami alami," ungkap Gendo. ForBALI, menurutnya, menyadari sepenuhnya jika reklamasi Teluk Benoa adalah agenda rakus dari pengusaha yang di-*back-up* oleh pen-

guasa. "Tentu saja mereka tidak akan membiarkan dengan gampang ada agenda-agenda penolakan reklamasi, apalagi dalam level internasional seperti UWRF. Hal ini menunjukkan betapa kekuasaan menggunakan *power*-nya dengan berbagai alasan untuk menutup dan mempersempit setiap wacana penolakan reklamasi Teluk Benoa," paparnya.

Gendo Suardana sangat menyayangkan panitia menyerah begitu saja atas upaya-upaya pembatalan beberapa sesinya termasuk sesi panel ForBALI. Sebagai sebuah festival berkaliber internasional semestinya tidak segampang itu ditekan oleh penguasa. "Bukankah persiapan mereka sudah matang, konsep acara sudah diperhitungkan dengan teliti, baik kesesuaian dengan visi festival maupun manfaat dan risiko yang akan dihadapi," tegas Gendo yang juga Koordinator ForBALI.

Gendo Suardana menyebut pembatalan sesi gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa ini sebagai perpaduan sempurna untuk membungkam kebebasan berekspresi. (r)

Edisi : Jumat, 30 Oktober 2015

Hal : 7



Soal Dana Pilkada Tak Harus Ada Surat Jaminan Pencairan Dana

Singaraja (Bali Post) –

Permintaan KPU Buleleng agar ada jaminan terkait kepastian pencairan dana pelaksanaan pilkada di awal tahun 2017 mendatang hingga kini belum disikapi pemerintah daerah. Permintaan itu belum ditanggapi karena pemerintah daerah berpandangan tidak harus ada jaminan dalam bentuk surat “hitam di atas putih” terkait pencairan dana pilkada yang telah disepakati dalam tiga tahapan itu. Hal ini karena pemerintah daerah memiliki kewajiban menyukseskan pilkada, termasuk menyiapkan anggarannya. Dengan disepakatinya mekanisme usulan dana pilkada pada APBD itu sudah cukup sebagai jaminan pemkab menyiapkan dana pilkada.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka mengatakan hal itu ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10) kemarin. Lebih jauh Puspaka mengatakan, rapat untuk menyepakati anggaran pilkada dalam tiga tahapan itu dipandang sudah cukup, karena telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Alasan lain pihak-pihak penyelenggara pilkada dan pemkab merupakan unsure penyelenggara pemerintah. Undang-undang juga mengatur kalau penyelenggara pemerintah di daerah wajib menyukseskan dari segi pendanaan hajatan pilkada itu. Atas pertimbangan itu, surat perjanjian itu tidak perlu dibuat. Apalagi, pemerintah daerah sudah berkomitmen mendukung penuh pilkada agar bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses. “Tidak usah ada surat jaminan seperti yang diminta KPU. Karena kita bersama sudah menjadi unsur penyelenggara pemerintah dan kita wajib menyukseskan, mendukung



Bali Post/kmb38

Dewa Ketut Puspaka

proses termasuk dana yang diperlukan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, TAPD bersama KPU, Bawaslu Bali, unsur TNI/Polri, dan Banggar DPRD telah menyepakati anggaran dana pilkada diusulkan tiga tahap. Kesepakatan hingga tiga tahap itu relevan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah. Sesuai komitmen itu, anggaran pilkada itu mulai dari APBD Induk 2016 berlanjut ke APBD Perubahan, dan termin terakhir melalui APBD Induk 2017 mendatang. Setelah menyepakati mekanisme usulan dan pilkada dalam APBD, TAPD bersama KPU, Bawaslu dan unsur TNI/Polri membahas lebih lanjut detail anggaran yang akan dibuktikan.

Ketua KPU Gede Suardana meminta agar pemkab memberikan jaminan agar dana pilkada bisa dicairkan di awal tahun. Hal ini karena sesuai tahapan pilkada, KPU paling banyak membutuhkan anggaran di awal Januari 2017. Jika dana ini tidak bisa direalisasikan di awal tahun ada kekhawatiran kalau situasi ini akan dimanfaatkan oknum tertentu menghambat bahkan menunda pilkada dari jadwal Februari 2017 mendatang. (kmb38)

Edisi : Jumkt, 30 Oktober 2015

Hal : 11